**PENGARUH PENGANGGARAN DANA DESA
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI**

Yusup Umar

Email: yusupumar807@yahoo.co.id

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Wati Karmila

Email: watifazrin1@gmail.com

STAI Darul Arqom Muhamadiyah Garut

Abstract

This study uses a quantitative approach. The population of this study were all employees of Palabuhanratu Subdistrict, Palabuhanratu Subdistrict employees and 9 village apparatuses throughout Palabuhanratu Subdistrict totaling 156 people and the number of samples was taken 70% of the total population so that a sample of 109 people was obtained. The calculation results show that the Village Fund Budgeting variable in Palabuhanratu District is included in the good category with an average score of 3.45 or 69.00% of the ideal value, while the economic empowerment of the community in Palabuhanratu District is included in the sufficient category with an average score of 3.39 or 67.80% of the ideal value. The results of statistical analysis obtained the price of $r_{XY} = 0.527$ which is included in the criteria is quite strong. With a significance value (2-tailed) $0.000 < 0.05$ or $t_{count} = 6.414 > t_{table} = 1.982$, so it can be concluded that there is an effect of the Village Fund budget on community economic empowerment in Palabuhanratu District. The coefficient of determination (KD) is 0.2777, meaning that the contribution of the village fund budget variable (X) to the community economic empowerment variable (Y) in Palabuhanratu District, Sukabumi Regency is 27.77%, and the remaining 72.23% is determined by other factors. While the linear regression equation model obtained is $Y = 21.176 + 0.507X$

Keywords: Budgeting, village funds, empowerment, economy, community.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Kecamatan Palabuhanratu, pegawai Kelurahan Palabuhanratu dan aparatur 9 desa Se-Kecamatan Palabuhanratu yang berjumlah 156 orang dan jumlah sampel diambil 70% dari jumlah populasi sehingga diperoleh sampel sebanyak 109 orang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel Penganggaran Dana Desa di Kecamatan Palabuhanratu termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata skor sebesar 3,45 atau 69,00% dari nilai idealnya, sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu termasuk dalam kategori cukup dengan rata-rata skor sebesar 3,39 atau 67,80% dari nilai idealnya. Adapun hasil analisis statistik diperoleh harga $r_{XY} = 0,527$ yang termasuk dalam kriteria cukup kuat. Dengan nilai signifikansi (2-tailed) $0,000 < 0,05$ atau $t_{hitung} = 6,414 > t_{tabel} = 1,982$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh anggaran Dana Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu. Koefisien determinasi (KD) sebesar 0,2777, artinya kontribusi variabel anggaran dana desa (X) terhadap variabel pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebesar 27,77%, dan 72,23% selebihnya ditentukan oleh faktor lain. Sedangkan model persamaan regresi linear yang didapatkan adalah $\hat{Y} = 21,176 + 0,507X$

Kata Kunci : Penganggaran, dana desa, pemberdayaan, ekonomi, masyarakat.

Submitted: 15-09-2022 | Accepted: 23-09-2022 | Published: 24-09-2022

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa perubahan penting dalam paradigma pembangunan daerah. Esensi Undang-undang ini adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki kepastian dengan nominal berkisar rata-rata Rp. 1,4 miliar bagi pembiayaan pembangunan. ADD tersebut diambil dari dana perimbangan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersifat memaksa bagi pemerintah daerah direalisasikan. Jika tidak, pemerintah pusat akan langsung memotong sebagian dana yang ditransfer ke daerah itu sejumlah hak (pemerintah) desa sesuai dengan kuota alokasi.

Besaran dana sejumlah itu tentu sangat berarti bagi pemerintah desa sehingga desa berpeluang menjadi pusat pembangunan, pertumbuhan dan kreativitas sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah pun akan sangat terbantu dalam memberikan sentuhan nyata nan merata bagi masyarakat di seluruh wilayahnya karena sudah ada kepastian anggaran negara yang dialokasikan langsung ke setiap desa. Dengan demikian Pemerintah Daerah hanya perlu mengaktifkan koordinasi secara optimal sehingga tata

kelola pemerintahan dan pembangunan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Undang-undang Desa ini merupakan kebijakan dalam rangka pembangunan modernisasi desa.

Kendati demikian, Undang-undang Desa ini diperkirakan juga berpotensi memunculkan konflik atau permasalahan politik dan sosial di tingkat desa, antara lain:

Pertama, terkait dengan proses-proses politik, perebutan kursi kepala desa akan sangat panas seperti halnya dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) langsung selama ini. Praktik politik uang pun bukan mustahil akan kian marak dalam pilkades itu. Soalnya, yang diperebutkan pada dasarnya bukan sekedar jabatan kepala desa, melainkan nilai nominal dan sudah adanya kepastian ADD, yang dibayangkan akan begitu strategis peran pemimpin tertinggi di Komunitas berbasis ruang itu. Apalagi dengan peluang masa jabatan sampai tiga periode (18 tahun, setiap periode 6 tahun), diperkirakan jabatan kepala desa berikut perangkatnya akan diperebutkan para figur potensial di desa. Tentu saja kecenderungan semacam itu akan mengancam harmoni sosial di pedesaan.

Kedua, pengelolaan dana desa yang mana kepala desa diposisikan semacam “kuasa pengguna anggaran” akan berpotensi untuk selalu “dicurigai” masyarakat desa, terutama para pesaing politiknya. Peluang penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan dana berpotensi terjadi dilakukan oknum kepala desa dan atau perangkat terkait lainnya. Soalnya, adanya ADD yang cukup banyak itu boleh jadi akan menimbulkan semacam geger budaya bagi para kepala desa. Apalagi jika tidak dilakukan berbagai persiapan sosial yang matang, termasuk didalamnya berbagai bentuk pelatihan ketrampilan dalam manajemen keuangan desa.

Dalam konteks di atas, moralitas dan kapasitas para kepala desa dan perangkatnya akan sangat menentukan tata kelola pemerintahan desa berikut anggarannya. Jika orientasinya pada upaya mengakumulasi harta dengan memanfaatkan jabatan kepala desa, apalagi meniru ada pengalaman konspiratif yang kerap terjadi di elite atas, dana yang dialokasikan di desa itu hanya akan menjadikan sebagian oknum kepala desa dan perangkatnya akan menjadi klien aparat penegak hukum, dan selanjutnya terbuka untuk mengisi hotel prodeo. Atau, sebagaimana dalam kebiasaan selama ini, para kepala desa yang tersangkut masalah dalam pengelolaan dana desa itu akan menjadi “ATM” bagi para oknum penegak hukum.

Ketiga, pada tahap awal perencanaan pembangunan desa belum tentu bisa dilakukan dengan baik mengingat kapasitas sumber daya manusia yang belum tentu tersedia dan

atau sama di setiap desa. Sementara itu anggaran harus dialokasikan secara efektif dan digunakan secara efisien untuk mencapai target terfokus untuk menjadikan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak penciptaan kesejahteraan rakyat.

Munculnya permasalahan dalam implementasi Undang-undang Desa tersebut nampaknya harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah melalui Bapemdes maupun Pemerintah Kecamatan setempat melalui perencanaan dan pengawasan yang efektif. Artinya, tercapai tidaknya misi utama Undang-undang Desa tersebut sangat bergantung pada perencanaan dan pengawasan atas implementasi agenda pembangunan desa dengan memastikan alokasi dana memberi sentuhan langsung atau menjawab kebutuhan masyarakat. Beberapa hal yang penting dilakukan dalam implementasi Undang-undang Desa tersebut antara lain:

- 1) Persiapan sosialisasi Undang-undang ini harus dilakukan secara intens dan menyeluruh di seluruh desa dengan pendekatan dan metode yang tepat;
- 2) Pendidikan politik rakyat sangat urgen agar Undang-undang Desa diimplementasikan dengan tetap menjadikan masyarakat yang berbasis ruang sebagai modal sosial yang berkarakter saling percaya dan tetap solid;
- 3) Kepemimpinan dan pengelolaan anggaran desa dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga secara pasti mengarah pada *good village governance*; dan
- 4) Pendampingan profesional dalam kaitan dengan kepemimpinan desa dalam paradigma baru sangat dibutuhkan.

Jika langkah-langkah tersebut di atas dilakukan, niscaya desa akan berkembang pesat, bahkan tidaklah berlebihan bila desa dikatakan sebagai “ujung tombak” pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara yaitu menyejahterakan rakyat. Bagi kader-kader muda potensial pun terbuka peluang untuk secara profesional mengembangkan kreativitas sosial ekonomi di desa. Tugas kita bersama adalah menanamkan nilai-nilai kecintaan kepada desa di satu pihak, dan pada saat yang sama mengembangkan jiwa wirausaha bagi para generasi muda untuk berkarya di desa.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa warga masyarakat setempat (local) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumberdaya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi aktif, nyata, dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur. Pemberdayaan masyarakat bertujuan menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan sumberdaya yang ada pada masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat dari pembangunan saja tetapi juga ikut mempengaruhi arah pelaksanaan program-program pembangunan.

Isu pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Palabuhanratu adalah sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah.

Pendekatan *top-down* tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan-keputusan dan rencana-rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

Hasil pengamatan lapangan ditemukan masalah yaitu kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal:

- 1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan.
- 2) Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.

- 3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.
- 4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu, belum dilaksanakan secara efektif dan terarah sehingga belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

- 1) Kurangnya bantuan modal. Pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK) pada umumnya merasa kesulitan untuk mendapatkan kredit melalui badan resmi yang disebabkan persyaratan-persyaratan yang dinilai masyarakat sering kali terlalu berbelit dan sulit dipenuhi.
- 2) Kurangnya bantuan pembangunan prasarana. Pada umumnya, pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK) yang berada di wilayah pedesaan terkendala oleh minimnya infra struktur jalan dalam memasarkan hasil usahanya.
- 3) Kurangnya bantuan pendampingan. Dalam kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi salah satu penyebab kurangnya peran perempuan dalam pembangunan. Sehingga pada umumnya para pelaku usaha membutuhkan pendamping yang dapat dijadikan konsultan bagi usahanya.
- 4) Kurangnya penguatan kelembagaan. Kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan. Nampaknya pelaku usaha di Kecamatan Palabuhanratu belum menunjukkan koordinasi yang baik atau tidak adanya pengembangan informasi dan jaringan di antara kelompok-kelompok usaha atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui kegiatan sektoral mau pun kelompok-kelompok usaha masyarakat yang tumbuh dari bawah, sehingga perlu dilakukan advokasi, pendampingan ataupun fasilitasi terhadap penataan kelembagaan dan jaringan.
- 5) Kurangnya penguatan kemitraan usaha. Pelaku usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil di Kecamatan Palabuhanratu sering kali kurang mendapatkan akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen yang kemudian biasanya berhubungan dengan aspek kualitas atau mutu produk yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh teknologi yang dipergunakan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu maka salah satu upaya adalah pengelolaan dana desa yang demokratis, partisipatif, akuntabel, dan transparan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penganggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu?.
- 2) Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Palabuhanratu?.
- 3) Bagaimanakah pengaruh penganggaran dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Palabuhanratu?

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui penganggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu.
- 2) Mengetahui pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Palabuhanratu.
- 3) Mengetahui pengaruh penganggaran dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Palabuhanratu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi:

- 1) Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi sebagai bahan informasi dan referensi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 2) Pihak desa-desa Kecamatan Palabuhanratu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pentingnya penganggaran Dana Desa sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Anggaran Dana Desa

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran yang sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilaksanakan di masa mendatang terkait dengan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Bastian (2006: 163) mendefinisikan anggaran sektor publik

sebagai rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satuan moneter atau suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi informasi pendapatan, belanja, dan aktivitas. Sedangkan Mardiasmo (2009: 61) memberikan pengertian bahwa anggaran sektor publik merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Sementara itu, Shim, Jae K., & Siegel, Joel G. (2009: 1) menyatakan bahwa "*A budget is defined as the formal expression of plans, goals, and objectives of management that covers all aspects of operations for a designated time period*". Anggaran didefinisikan sebagai pernyataan formal dari perencanaan, arah dan tujuan manajemen yang meliputi semua aspek operasional dalam kurun waktu tertentu. Pengertian ini menekankan bahwa anggaran dapat dimaknai sebagai rencana finansial yang berisi sasaran (target) dan arah yang hendak dicapai oleh suatu organisasi pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan paparan di atas, maka anggaran dapat dipandang sebagai "*blueprints*" yang memproyeksikan aktivitas kinerja dan merupakan formalisasi dari proses perencanaan organisasi dalam bentuk rencana finansial yang menyatakan: (1) berapa biaya atas rencana pengeluaran dan pembelanjaan, dan (2) berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Sedangkan penganggaran didefinisikan sebagai proses atau metode yang mempersiapkan anggaran (Mardiasmo, 2009: 61). Pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Jae K., & Siegel, Joel G. (2009: 3-4) yang mengartikan penganggaran sebagai "*a planning and control system*". Penganggaran didefinisikan sebagai perencanaan dan sistem kontrol yang memungkinkan semua anggota suatu organisasi memahami apa yang diharapkan dari organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi publik, perencanaan merupakan determinan yang mengarahkan aktivitas anggotanya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tanpa pemahaman atas perencanaan yang ditetapkan suatu organisasi, maka sasaran dan tujuan organisasi menjadi kabur, tidak jelas, dan tidak memungkinkan adanya sistem kontrol guna perbaikan pada masa mendatang.

Dengan demikian, secara keseluruhan penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses atau metode dalam menyusun suatu rencana kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Secara tradisional prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang

dikenal dengan "*The three Es*", yaitu Ekonomi, Efisien, dan Efektif (Jones dan Pendlebury dalam Bastian, 2006: 177). Ekonomis hanya berkaitan dengan input, efektivitas hanya berkaitan dengan output, sedangkan efisiensi adalah kaitan antara output dengan input.

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip penganggaran sangatlah dinamis. Munculnya konsep "*good governance*" sangat menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Shahfritz dan Russel dalam Bastian (2006: 178) mengemukakan 6 (enam) prinsip penganggaran, yaitu:

- 1) *Demokratis*, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.
- 2) *Adil*, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) *Transparan*, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum.
- 4) *Bermoral tinggi*, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga senantiasa pada etika dan moral yang tinggi.
- 5) *Berhati-hati*, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara.
- 6) *Akuntabel*, berarti bahwa pengelolaan keuangan Negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat.

Soleh dan Rochmansjah (2009: 10-11) menambahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah harus berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi, dan pengendalian.

Keuangan Desa menurut Undang-undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Kartasmita dalam Mudir (2016: 5040) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat *“people centered participatory, empowering and sustainable”* selama ini paradigma yang paling dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan negara dalam posisi sentral dalam merencanakan dalam melaksanakan pembangunan.

Hikmat dalam Yogia dan Suri (2020: 250) berpendapat bahwa konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan tidak lagi berpusat pada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali terhambat oleh karena pemerintah tidak mengetahui untuk siapa, apa pendekatan yang sesuai, dan bagaimana caranya program pembangunan tersebut dilaksanakan. Program pembangunan yang terpusat pada pemerintah seringkali mencapai tujuannya secara makro namun pada hakikatnya komunitas yang berada di tingkat mikro tidak mendapat pengaruh ataupun tidak dijangkau oleh pembangunan tersebut

Sedangkan Mardikanto dan Soebianto (2015: 61) mendefinisikan pemberdayaan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dalam konteks ini, pemberdayaan dimaknai sebagai proses, merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan

yang diperlukan guna memperbaiki kehidupan.

Sementara itu, Mardikanto dan Soebianto (2015: 61) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 169 ayat 1 menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Sedangkan menurut Winarni dalam Mudir (2016: 5040) mengatakan bahwa pada intinya pemberdayaan masyarakat adalah meliputi tiga hal yaitu, pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi juga terjadi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, hingga dapat diberdayakan hingga mencapai kemandirian.

Berkaitan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, Mardikanto dan Soebianto (2015: 111-112) mengemukakan 9 (sembilan) upaya perbaikan, yaitu (1) Perbaikan pendidikan (*better education*), (2). Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), (3). Perbaikan tindakan (*better action*), (4). Perbaikan kelembagaan (*better institution*), (5). Perbaikan usaha (*better business*), (6) Perbaikan pendapatan (*better income*), (7) Perbaikan lingkungan (*better invorenment*), (8) Perbaikan kehidupan (*better living*), dan Perbaikan masyarakat (*better community*).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo dalam Kurniawati, Supriyono, dan Hanafi (2014: 11), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini.

Selain itu, menurut Nuryoso dalam Kurniawati, Supriyono, dan Hanafi (2014: 111), usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-masing wilayah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembinaan. Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Mardikanto dan Soebianto (2015: 61) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang member kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan Conyers dalam Kurniawati, Supriyono, dan Hanafi (2014: 11) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Sumodiningrat dalam Yopa (2017: 5) berpendapat bahwa konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas adalah pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modrn, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan melalui perubahan struktural, yaitu dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan menjadi ke kemandirian. Sedangkan Hutomo (2000: 3) mendefinisikan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Tujuan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal (Suharto, 2009: 60). Tujuan yang ingin

dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat serta individu yang mampu mandiri dalam menjalani kehidupan.

Suharto (2009: 67) mengemukakan dalam kaitannya dengan kelima aspek tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui 5 (lima) strategi pemberdayaan yaitu pertama pemungkinan, kedua melalui penguatan, ketiga memberikan perlindungan, keempat memberikan penyokongan, kelima pemeliharaan. Sedangkan menurut Ismawan dalam Yopa (2017: 6) menetapkan 5 (lima) program strategi pemberdayaan yaitu, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pengembangan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat guna.

Menurut Dahama dan Bhatnagar (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015: 106) disebutkan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu minat dan kebutuhan masyarakat, melibatkan organisasi masyarakat bawah (keluarga), pemberdayaan harus menyesuaikan keragaman budaya lokal, kegiatan pemberdayaan jangan sampai menimbulkan shock culture atau perubahan budaya yang mengejutkan masyarakat, kerjasama dan partisipasi, demokrasi dalam penerapan ilmu yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menawarkan penggunaan metode pemberdayaan ataupun dalam pengambilan keputusan.

Menurut Wrihatnolo dalam Yopa (2017: 6) menyebutkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui membangun kesadaran ekonomi masyarakat, dengan memberikan pencerahan kepada target yang akan diberdayakan. Selanjutnya penguatan kapasitas, yaitu memberikan daya atau kuasa, masyarakat harus mampu terlebih dahulu. Proses selanjutnya adalah pendayaan, yaitu pemberian daya dan kekuatan kepada target yang disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang dimiliki masyarakat.

Hutomo (2000: 7-10), menyebutkan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut:

1) Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal

juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

2) Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3) Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

4) Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah

pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5) Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

2.6. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan dasar regulasi pemberian dana desa yang berasal dari dana perimbangan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Mengingat pentingnya dana desa tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah desa harus mampu mengelola anggaran dana desa secara efektif dan efisien. Dana desa merupakan salah satu bentuk anggaran sektor publik, sehingga pengelolaannya harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan

anggaran sektor publik. Menurut Shahfritz dan Russel dalam Bastian (2006: 178) mengemukakan 6 (enam) prinsip penganggaran, yaitu (1) *Demokratis*, (2) *Adil*, (3) *Transparan*, (4) *Bermoral tinggi*, (5) *Berhati-hati*, dan (6) *Akuntabel*.

Jika pengelolaan anggaran desa oleh pemerintah desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tujuan pemberian dana desa akan terwujud dengan baik, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Sumodiningrat dalam Yopa (2017: 5), pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Hutomo (2000: 7-10), menyebutkan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari 5 (lima) dimensi berikut: (1) *Bantuan Modal*, (2) *Bantuan Pembangunan Prasarana*, (3) *Bantuan Pendampingan*, (4) *Penguatan Kelembagaan*, dan (5) *Penguatan Kemitraan Usaha*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara eksak dan menganalisis datanya menggunakan perhitungan statistik. Sementara itu, Sugiyono (2017: 2) mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.2. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian. Silalahi (2010: 117) mendefinisikan variabel sebagai konstruk atau konsep yang memiliki variasi nilai. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu:

Variabel bebas (X) : Penganggaran Dana Desa

Variabel terikat (Y) : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, dapatlah dikemukakan definisi variabel penelitian sebagai berikut:

1). Penganggaran dana desa (X) adalah proses perencanaan organisasi dalam bentuk

rencana finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa di Kecamatan Palabuhanratu yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Sukabumi dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi: (1) Demokratis, (2) Adil, (3) Transparan, (4) Bermoral tinggi, (5) Berhati-hati dan (6) Akuntabel

- 2). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Y) adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya, dengan dimensi: (1) Bantuan Modal, (2) Bantuan Pembangunan Prasarana, (3) Bantuan Pendampingan, (4) Penguatan Kelembagaan dan (5) Penguatan Kemitraan Usaha.

3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2017: 215) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya., sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi itu. Sedangkan Usman dan Akbar (2009: 42-43) menambahkan bahwa populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Kecamatan Palabuhanratu, pegawai Kelurahan Palabuhanratu dan aparatur 9 desa Se-Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang berjumlah 156 orang. Berkaitan dengan pengambilan sampel, Riduwan dan Akdon (2005: 245) mengatakan bahwa dengan ukuran populasi lebih dari 30 orang maka sampling jenuh (sensus) tidak dapat dilakukan. Berkaitan dengan penentuan besarnya sampel (*sample size*), Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan patokan Suharrsimi yaitu menggunakan digunakan 10-15% atau 20-25% atau lebih. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan 70% dari total populasi, sehingga

diperoleh:

$$n = \frac{70}{100} \times 156 \text{ pegawai} = 109,2 \approx 109 \text{ pegawai.}$$

3.4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik jika asumsi-asumsi statistiknya terpenuhi. Apabila asumsinya tidak terpenuhi, maka data akan dianalisis dengan teknik bebas distribusi atau non-parametrik. Teknik statistik parametrik menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan antara lain data dipilih secara acak (*random*), datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linear, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sesuai dengan subyek yang sama. Kalau salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka analisis parametrik tidak dapat dilakukan. Uji asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain Uji Normalitas Data dan Uji Linearitas Data.

Adapun teknik analisis statistik yang digunakan 2 teknik yaitu teknik analisis deskriptif persentase (DP) dan analisis statistik inferensial. Analisis Statistik Deskriptif dimaksudkan untuk melihat gambaran umum karakteristik sumber data penelitian dilakukan pengelompokan data ke dalam dua kelompok yaitu kelompok data penganggaran dana desa dan kelompok data pemberdayaan ekonomi masyarakat. Skor masing-masing item dan variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata skor} = \frac{\sum FN}{n}$$

dimana:

n = jumlah responden

$\sum FN$ = jumlah hasil kali antara frekuensi (F) dengan bobot pilihan (N).

Sedangkan analisis statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear tunggal, yaitu teknik analisis yang dipergunakan untuk memprediksi perubahan nilai Y atas X. Sedangkan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antar variabel yang dianalisis dilakukan dengan analisis korelasi *Pearson Product Moment* (PPM).

Selanjutnya, Sugiyono (2010: 231) menyatakan bahwa “untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti digunakan statistik uji-t”, sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

dimana:

t_{hitung} = nilai t_{hitung}

r = nilai koefisien korelasi

n = banyaknya sampel

kemudian nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi (α) = 5%, dengan kaidah pengujian sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka terdapat hubungan antara variabel yang diteliti

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak terdapat hubungan antara variabel yang diteliti.

Adapun untuk menyatakan persentase besar kecilnya sumbangan variabel penganggaran dana desa (X) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) dapat ditentukan dengan rumus Koefisien Penentu (KP) atau disebut juga Koefisien Determinasi (KD) dengan rumus: $KD = r^2 \times 100\%$

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis deskriptif masing-masing variabel diperoleh hasil sebagai berikut:

Pertama, penganggaran dana desa di desa Kecamatan Palabuhanratu termasuk dalam katagori baik. Berdasarkan perhitungan rata-rata skor terhadap variabel penganggaran dana desa (X) diperoleh rata-rata skor sebesar $\frac{3,45}{5} \times 100\% = 69,00\%$ dari nilai idealnya dan termasuk dalam kategori baik. Dengan kata lain sebanyak 69,00% responden memiliki persepsi bahwa penganggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu telah berjalan dengan baik.

Untuk variabel penganggaran dana desa (X) di Kecamatan Palabuhanratu penulis mendasarkan pada teori dari Shahfritz dan Russel dalam Bastian (2006: 178) dan telah diolah sesuai dengan yang ada di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1). *Demokratis*. Untuk mengukur dimensi demokratis digunakan 3 (tiga) indikator yaitu partisipasi perangkat, partisipasi masyarakat, dan musrenbangdes. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk dimensi demokratis yang didasarkan pada rata-rata skor indikatornya maka diperoleh 3,56. Dengan demikian, jika dilihat dari dimensi tingkat demokratis dalam penganggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu termasuk dalam

kategori baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada proses penyusunan anggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu pada dasarnya telah memperhatikan aspek demokrasi dengan melibatkan perangkat desa, masyarakat, dan musrenbangde dengan baik.

2). *Adil*. Untuk mengukur dimensi tingkat keadilan dalam penyusunan anggaran desa digunakan 2 (dua) indikator yaitu prioritas program anggaran program proporsional. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk dimensi tingkat keadilan dalam tindakan yang didasarkan pada rata-rata skor diperoleh skor rata-rata 3,55 sehingga masuk dalam kategori baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada proses penyusunan anggaran desa di Kecamatan Palabuhanratu pada dasarnya telah memperhatikan tingkat keadilan dengan baik.

3). *Transparan*. Untuk mengukur dimensi tingkat transparansi dalam penyusunan anggaran dana desa digunakan 3 (tiga) indikator yaitu keterbukaan dalam perencanaan, keterbukaan dalam pelaksanaan dan keterbukaan dalam pertanggungjawaban. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk dimensi tingkat transparansi diperoleh skor rata-rata 3,54 sehingga masuk dalam kategori baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada proses penyusunan anggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu pada dasarnya telah memperhatikan aspek transparansi dengan baik.

4). *Bermoral tinggi*. Untuk mengukur dimensi tingkat moralitas penyusunan anggaran dana desa digunakan 3 (tiga) indikator yaitu penggunaan peraturan, etika, moral. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk bermoral tinggi diperoleh skor rata-rata 3,53 sehingga masuk dalam kategori baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada proses penyusunan anggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu pada dasarnya telah memperhatikan tingkat moralitas dengan baik.

5). *Berhati-hati*. Untuk mengukur dimensi tingkat kehati-hatian dalam penyusunan dana desa digunakan 2 (dua) indikator yaitu tingkat kewajaran, dan penggunaan sumber. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor diperoleh skor rata-rata 3,47 sehingga masuk dalam kategori baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada proses penyusunan anggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu pada dasarnya telah memperhatikan tingkat kehati-hatian dengan baik.

6). *Akuntabel*. Untuk mengukur dimensi tingkat akuntabilitas penyusunan anggaran dana desa digunakan 4 (empat) indikator yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses,

akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor diperoleh skor rata-rata 3,20 sehingga masuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada proses penyusunan anggaran dana desa di Kecamatan Palabuhanratu pada dasarnya telah memperhatikan tingkat akuntabilitas dengan cukup baik.

Dengan demikian, pihak pemerintah desa di Kecamatan Palabuhanratu sebaiknya terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan pola penyusunan anggaran dana desa agar ke depannya dapat lebih demokratis, adil, berhati-hati, transparan, maupun akuntabel.

Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan rata-rata skor diatas, diperoleh nilai Deskriptif Persentase (DP) variabel pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) sebesar $\frac{3,39}{5} \times 100\% = 67,80\%$ dari nilai idealnya dan termasuk dalam kategori cukup. Dengan kata lain sebanyak 67,80% responden memiliki persepsi bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu telah berjalan dengan cukup baik.

Analisis deskriptif variable pemberdayaan ekonomi masyarakat, peneliti mendasarkan pada teori Hutomo (2000: 7-10) dan telah diolah sesuai dengan yang ada di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1). *Bantuan modal*. Untuk mengukur dimensi bantuan modal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu digunakan 3 (tiga) indikator yaitu kepemilikan modal usaha, kemudahan memperoleh pinjaman, dan alternatif bantuan modal. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk dimensi bantuan modal diperoleh skor rata-rata 3,37 sehingga masuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bantuan modal dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu cukup baik.

2). *Bantuan Pembangunan Prasarana*. Untuk mengukur dimensi bantuan pembangunan prasarana dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu digunakan 3 (tiga) indikator yaitu pembangunan sarana produksi, sarana infrastruktur jalan, dan sarana pemasaran. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk dimensi bantuan pembangunan prasarana diperoleh skor rata-rata 3,42 sehingga masuk dalam kategori baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bantuan pembangunan prasarana dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu

telah berjalan dengan baik.

3). *Bantuan Pendampingan*. Untuk mengukur dimensi bantuan pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu digunakan 3 (tiga) indikator yaitu ketersediaan fasilitator proses belajar masyarakat, sarana pembelajaran masyarakat, dan pendamping usaha ekonomi. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk dimensi bantuan pendampingan diperoleh skor rata-rata 3,39 sehingga masuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bantuan pendampingan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu cukup baik.

4). *Penguatan Kelembagaan*, Untuk mengukur dimensi penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu digunakan 3 (tiga) indikator yaitu ketersediaan kelompok usaha ekonomi masyarakat, pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan distribusi ekonomi. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk dimensi penguatan kelembagaan diperoleh skor rata-rata 3,43 sehingga masuk dalam kategori baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu telah berjalan dengan baik.

5). *Penguatan Kemitraan Usaha*. Untuk mengukur dimensi penguatan kemitraan usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu digunakan 3 (tiga) indikator yaitu kepemilikan modal usaha, kemudahan memperoleh pinjaman, dan alternatif bantuan modal. Jika dilakukan perhitungan rata-rata skor untuk dimensi penguatan kemitraan usaha dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat diperoleh skor rata-rata 3,36 sehingga masuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penguatan kemitraan usaha dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu cukup baik.

Berdasarkan paparan di atas, maka pihak pemerintah desa di wilayah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi diharapkan terus melakukan upaya-upaya melalui berbagai kebijakan maupun program pemerintah agar di masa-masa mendatang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi mampu dikembangkan dengan baik.

Ketiga, penganggaran dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Palabuhanratu. Berdasarkan analisis statistik inferensial disimpulkan bahwa penganggaran dana desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perekonomian masyarakat, dengan model persamaan regresi linear yang didapatkan adalah $\hat{Y} = 21,176 + 0,507X$. Model persamaan regresi linear tersebut dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 21,176 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan (karena positif) nilai dari variabel anggaran dana desa (X), maka besarnya pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) sebesar 21,176. Koefisien regresi sebesar 0,507 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bernilai positif) satu satuan nilai anggaran dana desa (X) akan memberikan peningkatan nilai pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di Kecamatan Palabuhanratu sebesar 0,507.

Hasil analisis baik secara deskriptif maupun statistik secara keseluruhan menunjukkan bahwa penyusunan anggaran dana desa di desa-desa Kecamatan Palabuhanratu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya semakin baik penyusunan anggaran dana desa semakin baik pula tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Hasil analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu factor utama dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Palabuhanratu adalah upaya penyusunan anggaran dana desa yang demokratis, adil, penuh kehati-hatian, memiliki moral yang baik, transparan, dan akuntabel.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, besarnya rata-rata skor responden variabel penganggaran Dana Desa di Kecamatan Palabuhanratu termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata skor sebesar 3,45 atau 69,00% dari nilai idealnya.

Kedua, besarnya rata-rata skor responden variabel pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Palabuhanratu termasuk dalam kategori cukup dengan rata-rata skor sebesar 3,39 atau 67,80% dari nilai idealnya.

Ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh anggaran Dana Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan nilai:

- 1) $r_{XY} = 0,527$ yang berarti tingkat hubungan antara anggaran Dana Desa (X) dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di Kecamatan Palabuhanratu dalam kategori cukup kuat.
- 2) $KD = 0,2777$, artinya kontribusi variabel anggaran dana desa (X) terhadap variabel pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di Kecamatan Palabuhanratu sebesar 27,77%, dan 72,23% selebihnya ditentukan oleh faktor lain.
- 3) $t_{hitung} = 6,414 > t_{tabel} = 1,982$ yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel anggaran dana desa (X) terhadap variabel pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di Kecamatan Palabuhanratu.
- 4) Model persamaan regresi linear $\hat{Y} = 21,176 + 0,507X$, artinya konstanta sebesar 21,176 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan (karena positif) nilai dari variabel anggaran dana desa (X), maka besarnya pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) sebesar 21,176. Koefisien regresi sebesar 0,507 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bernilai positif) satu satuan nilai anggaran dana desa (X) akan memberikan peningkatan nilai pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di Kecamatan Palabuhanratu sebesar 0,507.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Hutomo, Mardi Yatmo. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas*, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta.
- Kurniawati, Dwi Pratiwi., Supriyono, Bambang., dan Hanafi, Imam. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 4, Hal 9-14.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, Totok., dan Soebiato, Poerwoko. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mudir. (2016). Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai

- Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016: 5034 – 5048*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Riduwan, dan Akdon. (2005). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Shim, Jae K., dan Siegel, Joel G. (2009). *Budgeting Basics and Beyond*. 3rd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleh, Chatib dan Rochmansjah, Heru. (2009). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: FokusMedia.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-26. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Usman, Husaini., dan Akbar, Purnomo. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara.
- Yenida, Elni Sumiarti. (2016). Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di wilayah Pesisir Pantai Sumatera Barat. *National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology. Politeknik Negeri Padang, 15–16 Oktober 2016* ISSN:254
- Yogia, Moris Adidi dan Suri, Dia Meirina (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan (*Implementation Of Empowerment Policy Through Economic Recommendations Business Programs*). *Sosio Konsepsia Vol. 9, No. 03, Mei – Agustus, Tahun 2020*
- Yopa, Kholidah Attina. (2017). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Budaya Di Kebondalemkidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. *Ringkasan Skripsi*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.